

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) SKPD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2022



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Pemda Pelaihari
Kode Pos : 70814
Telp : (0512) 21863-Fax (0512)21009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dapat disusun dengan baik.

Adapun tujuan pembuatan LKPJ dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, profesional, partisipatif dan akuntabel serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Dengan pembuatan LKPJ ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menjalankan prinsip-prinsip good governance.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna seperti yang apa diharapkan mengingat keterbatasan dan kemampuan pada kami, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan demi tersusunnya pelaporan yang lebih baik.

Pelaihari, 10 Januari 2023
**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT**

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M. Si
NIP. 196803041998031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi SKPD	3
1.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	3
1.1.2 Prioritas SKPD dalam Pencapaian Visi dan Misi Daerah	8
BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD	10
BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	11
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	11
3.2 Kebijakan strategis yang ditetapkan	24
BAB IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	25
BAB V. PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

		Halaman
1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022	8
2	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.....	11
3	Pelaksanaan Urusan Unsur Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Lingkup Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2022	12
4	Realisasi Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021	19

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut disusun dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

1.2. VISI DAN MISI SKPD

1.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Rencana Strategis Kabupaten Tanah Laut dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

**“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS,
AKTUAL, DAN SINERGI
(BERINTERAKSI)”**

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Berkarya

:

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

Tertata

Aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

Relegius

Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

Aktual

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sinergi

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “**DESA DIBINA, KOTA DITATA**”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “**KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS**”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti

meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut

- INOVASI : diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
- TERTATA : diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- RELIGIUS : diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat
- AKTUAL dan SINERGI : diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023, maka visi Sekretariat DPRD adalah *"Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Tanah Laut"*.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
3. Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
4. Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mempelancar dan memadukan setiap usaha untuk mencapai Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya maka dituangkan dalam bentuk kebijakan. Dengan demikian maka arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan kualitas Pelayanan dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan sarana prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian;
2. Meningkatkan dukungan kualitas penyelenggaraan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
3. Meningkatkan dukungan penyelenggaraan dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
4. Optimalisasi dukungan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD.

1.2.2. Prioritas SKPD dalam Pencapaian Visi dan Misi Daerah

Rencana program prioritas SKPD tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2022. Dalam mewujudkan prioritas SKPD, ada 2 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
4.02.01.2.16.03	<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4.02.01.2.15.03	<i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>
4.02.01.2.15.02	<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>
4.02.01.2.15.01	<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.01.2.09.11	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
4.02.01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>
4.02.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>
4.02.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
4.02.01.2.09.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.02.01.2.07.11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.01.2.08.03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
4.02.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
4.02.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.02.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>

BAB II.

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 semula berjumlah Rp. 61.202.812.673 menjadi Rp 63.394.799.817 Ada penambahan sebesar Rp. 2.191.987.144.- Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	-	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	-	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.	-

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	61.202.812.673	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	-	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp.	63.394.799.817
Surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp.	2.191.987.144

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan :

a. Semula	Rp.	-	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp.	-

Pengeluaran :

a. Semula	Rp.	-	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	-	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp.	-

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Sekretariat DPRD pada tahun 2022 mengalokasikan jumlah belanja sebesar Rp. 63.394.799.817,- sebelum perubahan sebesar Rp 61.202.812.673.-

Selanjutnya pada pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 50.101.561.416,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 79,03% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 13.293.238.401.- (20,97%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022
5	BELANJA DAERAH	63.394.799.817	50.101.561.416	79,03
5.1	BELANJA OPERASI	62.045.658.275	49.007.738.374	78,99
5.1.01	Belanja Pegawai	29.809.966.648	27.207.595.548	91,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.235.691.627	21.800.142.826	67,63
	JUMLAH BELANJA OPERASI	62.045.658.275	49.007.738.374	78,99
5.2	BELANJA MODAL	1.349.141.542	1.093.823.042	81,08
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	684.722.903	581.777.042	84,97
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	664.418.639	512.046.000	77,07

Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Lingkup Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan 9 dokumen	9 dokumen			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Setwan 12 bulan	12 bulan			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP dan SPMU Yang Terbit 81 dokumen	155 dokumen			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 20 buku	20 buku			
					Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD 20 buku	20 buku			
					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 20 buku	20 buku			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Jumlah Dokumen Laporan Kinerja 240 buku	240 buku			
					Jumlah Dokumen Laporan LHKPN 1 dokumen	1 dokumen			
					Jumlah Dokumen Laporan Penyiapan Bahan Tanggapan Periksaan 2 buku	2 buku			
					Jumlah Dokumen Laporan SPJ Fungsional Bendahara 24 buku	24 buku			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang 20 orang	20 orang			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis 13 jenis	13 jenis			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis 21 jenis	21 jenis			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis 12 jenis	12 jenis			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat 75 kali	472 kali			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis 17 jenis	14 jenis			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Listrik ,Air dan Internet 12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan 27 jenis	27 jenis			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji PTT Tugas Kebersihan, Penjaga Malam, Gaji PTT Supir & Tenaga Teknis Adm Lainnya 36 org (36 x 12 bulan = 432 ob)	36 org (36 x 12 bulan = 432 ob)			
					Terpeliharanya Peralatan Kantor 4 jenis	4 jenis			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan 4 jenis	4 jenis			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Jumlah Kendaraan Roda Empat 6 unit	6 unit			
					Jumlah Kendaraan Roda Enam 1 unit	1 unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin 9 jenis	9 jenis			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 5 jenis	5 jenis			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis 1 jenis	1 jenis			
					Jumlah dan Gedung 5 gedung	5 gedung			
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang Dibayar 12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah dan Jenis 4 jenis	4 jenis			
					Jumlah dan Stel 148 stel	140 stel			
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang 35 orang	31 orang			
				Layanan Administrasi DPRD					
				Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah Rapat 192 kali	2 kali			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda 19 dokumen	9 dokumen	Penyusunan dan Pembahasan Raperda belum selesai, dan pembahasan raperda dihentikan	1. memaksimalkan waktu penyusunan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. pembentukan Pansus pembahasan raperda di awal tahun 3. rapat paripurna penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah	
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda 19 dokumen		Pembahasan Raperda belum selesai, dan pembahasan raperda dihentikan	1. memaksimalkan waktu pembahasan raperda 2. pembentukan Pansus pembahasan raperda di awal tahun 3. rapat paripurna penyampaian raperda	
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Raperda 19 dokumen	9 dokumen	Pembahasan Kajian Perundang-Undangan untuk penyusunan Raperda belum selesai, dan pembahasan dihentikan	1. memaksimalkan waktu pembahasan Kajian Perundang-Undangan untuk penyusunan Raperda	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Raperda 3 dokumen	3 dokumen			
				Pembahasan Kebijakan Anggaran					
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen 4 dokumen	4 dokumen			
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen 7 dokumen	4 dokumen			
				Peningkatan Kapasitas DPRD					
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek 3 kali	175 ok			
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis 7 jenis	7 jenis			
					Jumlah Kegiatan 25 kali	90 kali			
					Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 308 kali	320 kali			
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang 8 orang (8 org x 12 bln =96 ob)	8 orang (8 org x 12 bln =96 ob)			
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang 8 orang (8 org x 12 bln =96 ob)	8 orang (8 org x 12 bln =96 ob)			
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen 2 dokumen	2 dokumen			

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Fasilitasi Tugas DPRD					
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah FGD 3 kali	1 kali			
					Jumlah Kegiatan 1099 kali	1452 kali			

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 untuk Capaian Target Kinerja keseluruhan berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2022 mencapai 120,72 % (sangat tinggi) dan capaian realisasi anggaran 79,05% (tinggi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2022

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			37.163.013.501		33.407.338.392		89,89%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	100	72.272.104	-	26.984.500	0,00%	37,34%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	9	72.272.104	9	26.984.500	100,00%	37,34%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	5.111.188.711	-	4.504.633.169	0,00%	88,13%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayaran Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN (Bulan)	12	5.053.614.428	12	4.466.601.769	100,00%	88,38%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	81	17.586.898	155	13.133.100	191,36%	74,68%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun*) (dokumen)	347	39.987.385	347	24.898.300	100,00%	62,27%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	323.500.000	-	101.948.786	0,00%	31,51%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	20	323.500.000	11	101.948.786	55,00%	31,51%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	100	2.206.980.327	-	2.117.189.457	0,00%	95,93%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	13	11.304.939	13	10.308.332	100,00%	91,18%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	21	24.586.745	21	14.301.710	100,00%	58,17%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	12	29.591.393	12	17.328.650	100,00%	58,56%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	75	2.141.497.250	472	2.075.250.765	629,33%	96,91%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*) (%)	100	1.172.858.967	53	945.727.522	52,90%	80,63%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*) (unit)	17	1.172.858.967	14	945.727.522	82,35%	80,63%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	100	1.301.499.412	-	1.192.546.953	0,00%	91,63%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	12	311.290.912	12	258.810.236	100,00%	83,14%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) (bulan)	27	16.241.100	27	14.034.157	100,00%	86,41%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	432	973.967.400	432	919.702.560	100,00%	94,43%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	910.869.785	-	621.584.326	0,00%	68,24%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	4	234.833.680	4	166.848.226	100,00%	71,05%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	21	215.925.851	21	153.256.300	100,00%	70,98%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	9	66.670.000	9	33.519.800	100,00%	50,28%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara*) (unit)	5	190.939.534	1	137.780.000	20,00%	72,16%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpeliharaan/terpelihara*) (unit)	6	202.500.720	5	130.180.000	83,33%	64,29%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentasi pemenuhan Hak Administrasi dan Keuangan Anggota DPRD (100%)	100	25.231.545.470	-	23.124.726.679	0,00%	91,65%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan DPRD (Tahun)	12	24.756.352.220	12	22.740.993.779	100,00%	91,86%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Atribut Pakaian Dinas untuk DPRD dan Sekwan , Tersedianya Pakaian Batik Tradisional untuk DPRD, Tersedianya PDH untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya PSH untuk DPRD, Tersedianya PSL untuk DPRD dan Sekwan , Tersedianya PSR untuk DPRD dan Sekwan (Jenis dan Stel)	152	405.193.250	152	325.775.900	100,00%	80,40%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check UP DPRD (Orang)	35	70.000.000	31	57.957.000	88,57%	82,80%
Layanan Administrasi DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya kegiatan fraksi dan kegiatan rapat DPRD (100%)	100	832.298.725	-	771.997.000	0,00%	92,75%
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Peserta Rapat (Orang)	192	33.554.289	2	9.423.000	1,04%	28,08%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat Koordinasi (Kali)	308	798.744.436	270	762.574.000	87,66%	95,47%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		128,72%	89,89%
				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi
SEKRETARIAT DPRD							
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			26.231.786.316		16.703.888.024		63,68%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Proses dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD untuk Kemajuan Daerah (100%)	100	7.299.256.761	-	4.415.979.386	0,00%	60,50%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	19	85.760.449	9	3.567.000	47,37%	4,16%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	19	6.997.821.500	9	4.254.200.386	47,37%	60,79%
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	19	9.796.309	9	2.645.800	47,37%	27,01%
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	3	205.878.503	3	155.566.200	100,00%	75,56%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Proses dan Mekanisme Pembahasan Kebijakan Anggaran sampai dengan Pertanggungjawaban APBD (100%)	100	94.394.280	-	38.438.200	0,00%	40,72%
Pembahasan APBD	Tersedianya Bahan Pembahasan APBD (Buku)	4	94.394.280	4	38.438.200	100,00%	40,72%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD (100%)	100	67.398.169	-	14.827.700	0,00%	22,00%
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tersedianya bahan untuk pengawasan Anggaran (Eksemplar)	7	67.398.169	-	14.827.700	0,00%	22,00%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentasi pemenuhan a kualitas Kinerja DPRD secara Profesional dan Terukur yang mewakili Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut (100%)	100	3.647.819.207	-	2.207.971.373	0,00%	60,53%
Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Kegiatan Bimtek DPRD (Kali)	5	2.164.425.000	10	1.132.384.097	200,00%	52,32%
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Tahun)	340	778.261.715	417	466.744.776	122,65%	59,97%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terbayarnya Honor Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (Tahun)	96	405.495.000	96	336.000.000	100,00%	82,86%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya Tenaga Ahli Fraksi DPRD ,Terpenuhinya Tenaga Ahli Fraksi DPRD (Tahun/Orang)	96	299.637.492	96	272.842.500	100,00%	91,06%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentasi pemenuhan Proses dan Mekanisme Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (100%)	100	1.074.297.701	-	682.638.800	0,00%	63,54%
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Dokumen Pokir DPRD (Buku)	2	1.074.297.701	1	682.638.800	50,00%	63,54%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	
Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya tugas pokok dan Fungsi DPRD (100%)	100	14.048.620.198	-	9.344.032.565	0,00%	66,51%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi untuk menunjang kinerja DPRD (Tahun)	1102	14.048.620.198	1.452	9.344.032.565	131,76%	66,51%
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		109,40%	63,68%
				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah
		63.394.799.817		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		120,72%	79,05%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						Sangat Tinggi	Tinggi

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Meningkatkan dukungan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	
2	Meningkatkan dukungan kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD
3	Meningkatkan dukungan penyelenggaraan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan sekretariat DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan sekretariat DPRD
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)	
4	Optimalisasi dukungan fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota	

BAB IV.
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan Urusan/kegiatan dimaksud.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Pencapaian kinerja program dan kegiatan merupakan informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan ini.

Dari uraian pelaksanaan kegiatan tahun 2022 secara umum program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan masih ada kendala atau masalah yang dihadapi sehingga pencapaian tujuan kurang maksimal.

Demikian laporan Pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 ini disampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja, diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya. Terimakasih.

Pelaihari, 10 Januari 2023


SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT
H. H. MUHAMMAD MURSYI, M. Si
NIP. 19680304 199803 1 009